SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36/HUK/2014

TENTANG

PANITIA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2014

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menghargai dan menjunjung tinggi nilai dan jasa perjuangan para pahlawan serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa, perlu melaksanakan Peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Peringatan Hari Pahlawan tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Panitia Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Sosial;

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 724);

9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1992 tentang Ziarah di Taman Makam Pahlawan/Makam Pahlawan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PANITIA PUSAT PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2014.

KESATU : Panitia Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas menyelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2014.

KETIGA : Dalam hal diperlukan kelengkapan panitia atau seksi-seksi Panitia Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2014, akan ditetapkan oleh Ketua Umum Panitia.

KEEMPAT : Susunan Panitia Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2014 untuk setiap daerah, terdiri atas:
a. provinsi ditetapkan oleh gubernur;
b. kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota; dan
c. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ditetapkan oleh kepala perwakilan Republik Indonesia.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2014 bertanggung jawab dengan menyampaikan laporan secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. panitia pusat menyampaikan laporan kepada Menteri Sosial selaku Ketua Umum Tim Peneliti Pengkaji Gelar Tingkat Pusat;
b. panitia provinsi menyampaikan laporan kepada gubernur selaku Ketua Tim Peneliti Pengkaji Gelar Tingkat Daerah dengan tembusan kepada Menteri Sosial selaku Ketua Umum Tim Peneliti Pengkaji Gelar Tingkat Pusat;
c. panitia kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur selaku Ketua Tim Peneliti Pengkaji Gelar Tingkat Daerah; dan
d. panitia perwakilan Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Menteri Sosial selaku Ketua Umum Tim Peneliti Pengkaji Gelar Tingkat Pusat.

KEENAM : Semua pembiayaan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Tahun Anggaran 2014 Nomor: DIPA-027.03.1.440213/2014 tanggal 5 Desember 2013.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 April 2014
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
5. Panglima TNI.
6. Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
7. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
8. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
10. Para Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri.
11. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
12. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
13. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia.
14. Para Pejabat Eselon I Kementerian Sosial Republik Indonesia.
15. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
16. Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi seluruh Indonesia.
17. Kepala Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial.
18. Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.
19. Kepala Pusat Kajian Kementerian Sosial.
20. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 36/HUK/2014
TANGGAL : 14 APRIL 2014
TENTANG : PANITIA PUSAT PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2014.

1.	Pelindung	:	Menteri Sosial
2.	Penanggung jawab Umum	:	Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial
3.	Penanggung jawab Teknis	:	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial
4.	Pengarah Umum	:	1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 3. Menteri Dalam Negeri 4. Menteri Luar Negeri 5. Menteri Sekretaris Negara 6. Menteri Pertahanan 7. Menteri Perhubungan 8. Menteri Komunikasi dan Informatika 9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 10. Menteri Agama 11. Panglima Tentara Nasional Indonesia 12. Kepala Kepolisian Republik Indonesia 13. Ketua Umum DPP LVRI 14. Ketua Umum DPP Pepabri 15. Ketua Umum DNIKS 16. Ketua Umum DHN ‘45 17. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 18. Ketua Umum Persatuan Keluarga Putra/Putri Perintis Kemerdekaan Indonesia (PKP3KI) 19. Ketua Umum YAPETA 20. Ketua Umum Ikatan Keluarga Pejuang TMPN Utama Kalibata 21. Ketua Umum Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia
5.	Pengarah Teknis	:	1. Kepala Staf Angkatan Darat 2. Kepala Staf Angkatan Laut 3. Kepala Staf Angkatan Udara 4. Gubernur Lemhanas 5. Sekretaris Militer Presiden 6. Pimpinan Umum Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia

SALINAN

6.	Penasehat Teknis	:	1. Inspektur Jenderal, Kementerian Sosial 2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial 3. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial 4. Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial 5. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Dampak Sosial, Kementerian Sosial 6. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Integrasi Sosial, Kementerian Sosial 7. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial 8. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Otonomi Daerah, Kementerian Sosial 9. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Sosial 10. Asops Panglima TNI 11. Asops Kepala Staf AD 12. Asops Kepala Staf AL 13. Asops Kepala Staf AU 14. Asops Kapolri 15. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 16. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri 17. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 18. Direktur Jenderal Potensi dan Pertahanan, Kementerian Pertahanan 19. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika 20. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan 21. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri 22. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama 23. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Daya Manusia serta Perlindungan dan Jaminan Sosial 24. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta Kemitraan Masyarakat 25. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan

7.	Ketua Umum	:	H. M. Bambang Sulistomo, Sip., M.Si Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI)
8.	Wakil Ketua Umum	:	Direktur Utama Kantor Berita Antara
9.	Ketua Pelaksana Harian	:	Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
10.	Wakil Ketua Pelaksana Harian	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial
11.	Sekretaris I	:	Kasubdit Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
12.	Sekretaris II	:	Wakil Ketua Umum Ikatan Keluarga Pejuang TMPN Utama Kalibata
13.	Bendahara I	:	Kabag Keuangan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial
14.	Bendahara II	:	Alroy Giovan, AMd. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
15.	Ketua I Bidang Upacara dan Haul Pahlawan Nasional	:	Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta
	Wakil Ketua I	:	Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Kementerian Sosial
	a. Ketua Seksi Upacara Ziarah Nasional	:	Asops. Kasgartap. I/Jakarta Anggota: 1. Kasubgar 0506/TGR 2. Kaprotgartap I/Jakarta 3. Kasie Pengelolaan TMP dan MPN Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial

b. Ketua Seksi Upacara Tabur Bunga di Laut : Asisten Personel Danlantamal III, Armada Kawasan Barat

Anggota :
1. Kasie Penggalian Nilai Kesetiakawanan Sosial Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
2. Barus Tondra Pramana, SH
   Protokol Kementerian Sosial

c. Ketua Seksi Haul Pahlawan Nasional : Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama

Anggota :
1. Kasubag Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial
2. Wati
   Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial

16. Ketua II Bidang Wisata Sejarah dan Kemah Kebangsaan : Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri

Wakil Ketua II : Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, Kementerian Sosial

a. Ketua Seksi Wisata Sejarah : Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Anggota :
1. Burhanudin Pohan
   IKPNI
2. Kasie Penggalian Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
3. Riza Azril, S.Hum.
   Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
4. Ir. Siti Amaria
   Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial

b. Ketua Seksi Kemah Kebangsaan : Kasubdit Persiapan Pemberdayaan, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Anggota :
1. Kasubdit Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
2. Kepala Poliklinik Kementerian Sosial
3. Kasie Pendayagunaan Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
4. Zainal Arifin
   Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial

c. Ketua Seksi Sarasehan : Krisbudiarjo
Leadership Award

Anggota :
1. Emi Destiatmi, M.Si.
   Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
2. Sintya Dewi Gunawan
   Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial
3. Artha P.P.A. Hanindito
   Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial

17. Ketua III Bidang Penganugerahan Gelar, Ramah Tamah, Ziarah Wisata, dan Kirab/Jajar Pejuang : Kepala Pusat Sejarah TNI

Wakil Ketua : Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Kementerian Sosial

a. Ketua Seksi Penganugerahan Gelar di Istana : Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Sekretaris Militer Presiden

Anggota :
1. Kadisdok Pusat Sejarah TNI
2. Kasie Penghargaan Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial

b. Ketua Seksi Ramah Tamah : Kasubdit. Penghargaan dan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan dan Perintis, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial

Anggota :
1. Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
2. Kasie Kesejahteraan, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
3. Ita Robita
   Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
4. Latifah
   Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia

c. Ketua Seksi Ziarah Wisata : Kasubdit Pengelolaan TMP dan MPN Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial

Anggota :
1. Kasie Standardisasi TMP dan MPN Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
2. Omar Samuel Ichwan
   IKPNI
3. Sukarsih
   Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia
4. Rian
   Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial

d. Ketua Seksi Kirab/ Jajar Pejuang : Iwari
Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia

Anggota :
Awan
Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial

18. Ketua IV Bidang Lomba : Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Kementerian Sosial

Wakil Ketua IV : BRA Koosmariam
Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI)

a. Ketua Seksi Car Free Day : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Anggota:
1. Syaiful Ulum
   Pengurus Nasional Karang Taruna

2. Yenni Rumi Sundari
   Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial

b. Ketua Seksi Pentas Seni : Ratna Listi (Duta Komunitas Adat Terpencil)

Anggota:
1. Daryono Sundaryo
   Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI)
2. Dwi Kristianto
   Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial

c. Ketua Seksi Lomba Cerdas Tangkas Kepahlawanan : DR. Abdurakhman
Universitas Indonesia

Anggota :
1. Warsono
   Musyawarah Guru Sejarah
2. Kasie Identifikasi Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
3. Ismail
   Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial

19. Ketua V Bidang Humas dan Lembaga, Publikasi dan Hening Cipta, serta Dokumentasi : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sosial

Wakil Ketua V : Editor in chief Kantor Berita Antara

a. Ketua Seksi Humas dan Lembaga : Kasubdit Kemitraan Media dan Dunia Usaha Direktorat Kemitraaan Komunikasi, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informasi

Anggota :
1. Kabag Organisasi, Hukum, dan Humas, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial
2. Kasubag Pemberitaan, Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sosial

b. Ketua Seksi Publikasi, Hening Cipta dan Dokumentasi : Kepala Pusat Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial

Anggota :
1. Kasub Bid. Dikpen Biddikmas Korlantas POLRI
2. Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sosial
3. Kepala Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Negara
4. Pejabat Fungsional Diplomat Utama Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri
5. Pusdatinkomtel Kementerian Dalam Negeri
6. Asisten Vice Presiden (AVP) Corporate Communication PT. Jasa Marga (Persero) Tbk
7. Kabid Ketertiban Masyarakat dan Sarana Kota, Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi DKI Jakarta
8. Kasubdit Jaringan Transportasi Perkotaan, Dit. Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Ditjen. Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan

20. Sekretariat

a. Koordinator Urusan Administrasi : Kasubag Tata Usaha Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial

Anggota :
1. Subandi
   Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
2. Abdul Rozak, SH
   Pusat Kajian Hukum, Kementerian Sosial
3. Asnawati
   Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
4. Ucu Kusmini, S.Ip.
   Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial

b. Koordinator Urusan Protokol : Kabag Tata Usaha Pimpinan Kementerian Sosial

Anggota :
1. Kasubag Protokol Biro Umum, Kementerian Sosial

2. Kasubag Hukum, Bagian OHH Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial
3. Tri Susilawati
   Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
4. Hermawan
   Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial

c. Koordinator Urusan Undangan : Kasubag Tata Usaha, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial

Anggota :
1. Suprianto, BA.
   Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
2. Djuju Ruskandar, BSW.
   Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
3. Daniel Salecha
   Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial
4. Aris Haryadi, A.Md.
   Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial

d. Koordinator Urusan Perlengkapan : Kabag Umum Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial

Anggota :
1. Dien Istiqomah Meyarti, S.Sos
   Kabag Rumah Tangga, Biro Umum Kementerian Sosial
2. Dedi Prasetyo Utomo
   Kasubag Rumah Tangga Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI